

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik timbul karena adanya kesenjangan fakta dan realita dalam masyarakat. Latar belakang konflik ialah awal mula penyebab sebuah gesekan–gesekan yang melahirkan sebuah ketidaksesuaian dan berkembang menjadi sebuah konflik. Latarbelakang sebuah konflik melahirkan intensitas konflik yang juga berbeda. Latar belakang konflik adalah suber seberapa besarkah konflik yang akan muncul, bisa kecil, sedang, dan besar. Dari prariset yang telah dilakukan dan atas dasar hasil wawancara yang telah dikumpulkan dari sumbar-sumber warga kedua Desa dan dari pihak pemerintahan Desa maka diketahui bahwa konflik di Desa Balinuraga ini dipicu dugaan pelecehan seks yang menimpa dua gadis remaja yang dilakukan oleh pemuda dari Desa Balinuraga. Akibat dari pelecehan yang dialami oleh dua gadis yang berasal dari Desa Agom tersebut terjadilah bentrok. Kronologi kejadian amuk massa itu berawal Sabtu malam saat dua gadis remaja dari Desa Agom yang melintas di Desa Balinuraga, jatuh dari motor. Kedua gadis ini diisukan mengalami pelecehan dengan cara dicolek-colek tubuhnya. Warga yang terdiri dari sejumlah Desa dan berasal dari seluruh Kecamatan yang ada di Lampung Selatan datang untuk menyerang Desa Balinuraga. Masa tidak hanya etnis Lampung namun terdiri dari etnis lain yang pernah berkonflik dengan warga Desa Balinuraga. Sekitar pukul 14.00 siang hari Senin, ribuan orang yang sudah berkumpul

sejak pagi melakukan serangan terhadap Desa Balinuraga. Sejumlah rumah warga hangus dibakar massa. Massa melampiaskan emosi dengan merusak dan membakar apa saja yang mereka temui. Desa balinuraga saat itu sudah ditinggalkan penghuninya menyelamatkan diri. Hampir semua rumah rata dengan tanah dilalap api. Massa yang membawa senjata tajam dari mulai parang, pedang, golok, clurit, bahkan senapan angin itu, tidak mampu dibendung anggota keamanan yang jumlahnya kalah banyak dibanding jumlah massa. Bahkan massa juga memblokir jalur lintas tengah Sumatera di antara dua Desa tersebut sehingga membuat lalu lintas macet total.

Munculnya berbagai kasus kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan tingkat kekhawatiran bahwa potensi terjadinya konflik sangat besar. Kasus di Lampung Selatan, tepatnya di wilayah Kecamatan Way Panji Desa Balinuraga. Dalam kasus ini, soal pelecehan seksual yang diduga sebagai pemicu konflik, yang telah menelan belasan korban jiwa dan menyebabkan perpecahan kedamaian masyarakat, sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es. Sebelum kasus konflik Balinuraga sudah banyak terjadi konflik-konflik di Lampung Selatan yang melibatkan warga etnis Bali dengan etnis-etnis lainnya pada Desa yang berbeda. Pada bulan Januari 2012 terjadi konflik di Kecamatan Sidomulyo, konflik tersebut dipicu hal sepele, yaitu perebutan lahan parkir yang melibatkan etnis Bali dari Desa Napal dan Etnis Lampung dari Desa Kotadalam. Sebelumnya juga terjadi konflik antara warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dengan pihak pemerintah masalah pendirian patung Zainal Abidin Pagaralam yang menyebabkan patung yang telah berdiri dan diresmikan tersebut dihancurkan dan dirobohkan.

Pada awal kasus di awal tahun 2012 sebenarnya masalah yang menyebabkan perpecahan sudah berhasil diatasi. Itupun setelah media masa menyoroti kasus ini. Ketika kasus

Balinuraga dan suku Lampung ini redam, Bupati malah membuat emosi warganya dengan perkataannya. Namun masalah ini akhirnya dapat diatasi secara kekeluargaan setelah Bupati minta maaf kepada warga, masalah emosional sedikit terlupakan. Bentrok kembali pecah, kali ini terjadi antara desa Balinuraga dengan desa Agom Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 14 korban jiwa dari kedua pihak. Hingga ratusan jiwa harus mengungsi. Banyak anak-anak yang tak bisa sekolah karena masalah ini.

Konflik Lampung Selatan menyangkut sejarah sosiologis menyebabkan terjadinya proses traumatik konflik, sehingga memunculkan perubahan struktur sosial. Perubahan itu salah satunya kemudian menyebabkan gesekan antara warga asli dengan pendatang (transmigran). Konflik berupa bentrokan antarwarga di Lampung Selatan menyangkut faktor sejarah dan sosiologis terkait dengan politik pada zaman Hindia Belanda tentang program irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Menanggapi konflik antarwarga di Lampung Selatan belum lama ini, bentrokan antarwarga tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya, dan kembali terulang. Konflik itu tidak hanya melibatkan Desa-desa yang ada di Lampung Selatan, tetapi juga memiliki akar persoalan yang lebih dalam. Beberapa konflik yang sempat terjadi sebelumnya itu di antaranya terkait dengan persoalan transmigrasi. Konflik Balinuraga tersebut merupakan kasus yang berulang dan lebih dalam lagi akar-akar persoalannya. Dalam konflik Balinuraga faktor perbedaan etnis Bali sangatlah ditonjolkan, karena dari sejarah etnis Bali di Balinuraga memiliki permasalahan dengan etnis-etnis lain dan Desa-desa yang ada disekitarnya, kebetulan kasusnya dipicu persoalan perempuan kemudian membesar hingga muncul korban. (Oki Hajiansyah Wahab, 2012;71)

Bentrok pemuda meluas menjadi Bentrok warga antardesa yang menjadi memanas dan sampai memakan korban jiwa serta harta benda yang terjadi kembali. Awal sebab munculnya konflik sosial dilihat dari kategori aktor yang terlibat, juga dapat dimulai dari konflik antarindividu, selain karena perebutan sumberdaya juga karena tindakan kriminal dan ketersinggungan. Konflik antarindividu, tindakan kriminal, dan keributan antarpemuda dapat menjadi pemicu berkembangnya konflik antarkelompok. Dalam konflik antara warga Desa Balinuraga dengan Desa Agom ada pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Dengan adanya isu pelecehan seksual yang terjadi, maka terdapat pihak-pihak yang menjadikan konflik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pihak-pihak tersebut ingin menggunakan konflik Balinuraga untuk mencapai tujuan pribadi ataupun kelompok tertentu yang ingin dicapai.

Menurut pendapat Hartoyo dalam buku “Merajut Jurnalisme Damai di Lampung” Muncul dan berkembangnya konflik serta sulit atau mudahnya konflik diselesaikan juga diduga ada yang dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Mereka ini biasa dikatakan pihak-pihak yang suka “memancing ikan di air keruh” (*free riders*), bahkan keberadaannya tidak terbatas. Artinya, bisa berasal dari anggota kelompok itu sendiri atau dari luar, bisa berada bersama pihak-pihak berkonflik dan bisa juga berada pada pihak yang ikut menyelesaikan konflik. (Budi Santoro Budiman, 2012;40)

Menurut H.S Tisnanta, dalam buku “Merajut Jurnalisme Damai di Lampung” peta konflik pertikaian warga antardesa di Lampung Selatan sangatlah besar, dari konflik di Kecamatan Sidomulyo Januari 2012, dan yang terbaru konflik terjadi di Balinuraga. Perdamaian yang dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput dan permasalahan yang sebenarnya. Eskalasi kekuatan massa orang Lampung

yang datang saat konflik berasal dari berbagai penjuru daerah di Provinsi Lampung. Puluhan truk dan alat transformasi yang membawa massa datang ke lokasi kerusuhan. Tercatat antara lain dari Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Bandar Lampung dan lain-lain. Datangnya bantuan tersebut dikarenakan ajakan bergabung melalui pesan singkat (SMS), melalui BBM, dan melalui jejaring sosial, sehingga gerakan massa menjadi masif. Dari beberapa analogi di atas, timbul dasar logika yang paling sederhana, mengapa mobilisasi massa tersebut tidak dicegah? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memfasilitasi pergerakan massa tersebut? Hal ini patut dipertanyakan karena masyarakat desa Agom dan sekitarnya jumlah massa tidak akan sebanyak massa tersebut. Disisi lain, Bupati Lampung Selatan Rycko Mendoza SZP juga berkonflik dengan masyarakat adat Lampung serta lawan-lawan politiknya. Konflik tersebut berpengaruh pada kewibawaan dan legitimasinya sebagai pemimpin. (Budi Santoro Budiman, 2012;63-64)

Siti Noor Laila, Komisioner Komnas HAM asal Lampung mengatakan konflik antar warga Desa Balinuraga dengan warga Desa Agom menjadi besar dan menyebabkan banyak korban karena kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Rycko Mendoza yang lemah serta adanya provokasi dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. “saat kejadian Bupati sedang berada di Jatinangor Jawa Barat bersama para Kepala Desa di Lampung Selatan untuk mengikuti bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan. Ketika pulang ke Lampung Selatan, dia juga tidak bisa langsung meredam emosi warga karena banyak warga yang masih marah dengan Bupati”.

Menurut Siti Noor Laila “persoalan ini tidak sesederhana yang diperkirakan banyak orang, masalahnya kompleks. Ada banyak kepentingan di dalam konflik, banyak kegagalan. Harus ada investigasi mendalam untuk bisa mengungkap kasus yang

sebenarnya.” Dari pengakuan seorang warga Ibu Made (ibukandung dari korban meninggal Gede Semarjaya) mengaku melihat dengan jelas pembunuhan anaknya karena anaknya telah dibunuh secara keji di depannya. “ia mengaku bukan warga Agom yang membunuh anaknya, warga Balinuraga dan warga Agom menurut Made sudah saling mengenal dan biasa untuk bekerjasama.” (Budi Santoso Budiman, 2012;9)

Dari kumpulan pendapat para praktisi konflik di atas dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa konflik Balinuraga sangatlah kompleks. Dari isu pelecehan seksual yang dilakukan pemuda, menjadi sebuah konflik besar yang memakan korban yang tidak sedikit. Dalam konflik yang terjadi banyak juga pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam konflik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Konflik balinuraga yang melibatkan etnis Bali dan etnis Lampung membuat sentimen etnis di Lampung Selatan menjadi sangat kuat. Sentimen etnis dalam konflik tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk dijadikan alat mencapai tujuan dalam mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.

Peneliti juga melihat beberapa riset-riset terdahulu. Riset-riset yang membahas tentang politisasi dan konflik.

Penelitian Pertama yang membahas tentang politisasi adalah penelitian dari “*Ferryzar Afriatama Semidang* tahun 2010. Judul penelitiannya adalah “*Politisasi Pada Perguruan Paku Banten dalam mendukung Drs. Sjachroedin Z.P pada pemilihan Gubernur 2008.*” Universitas Lampung. Skripsi dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi politisasi pada Organisasi Paku Banten dalam mendukung terpilihnya Drs. Sjachroedin Z.P pada pemilihan Gubernur 2008. Tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana Politisasi dalam Organisasi masa Paku Banten dalam

mendukung terpilihnya Drs. Sjachroedin Z.P sebagai Gubernur Lampung periode 2009-2014. Hasil dari penelitian ini ialah terjadinya politisasi perguruan paku banten dalam mendukung Drs. Sjachroedin Z.P menjadi Gubernur. Isu etnik dijadikan instrumen untuk memperoleh dan meningkatkan dukungan suara dalam Pilkada. Politisasi dalam perguruan Paku Banten pada Pilgub 2008 terlihat dengan adanya hubungan antara Sjachroedin Z.P dan Perguruan Paku Banten yang sangat baik, hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai cara oleh Sjachroedin Z.P untuk mempolitisasi anggota Paku Banten dan etnik Banten yang ada di Lampung agar memilihnya dalam pilgub 2008.

Penelitian kedua yang dijadikan referensi bagi peneliti adalah Skripsi dari "*Sukma Wulan*, Tahun 2010, dengan judul "*Politisasi Etnis Dalam Pilkada (study pada Rekrutment Calon Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Lampung Periode 2008-2013)*". Universitas Lampung: Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung." Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan judul yang ada yaitu apakah terjadi politisasi etnis dalam perekrutan calon wakil kepala daerah PDI Perjuangan Lampung. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya politisasi etnis di dalam perekrutan Joko Umar Said sebagai calon wakil kepala daerah PDI Perjuangan. Hasil dari penelitian ini ialah adanya politisasi dalam rekrutmen calon wakil kepala daerah yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Pemanfaatan etnik Jawa terjadi dalam penjaringan calon wakil kepada daerah untuk mendampingi Drs. Sjachroedin Z.P dalam Pilgub 2008. Hal ini juga didasarkan oleh pernyataan Drs. Sjachroedin Z.P selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, bahwa dia menginginkan calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan adalah beretnik Jawa.

Penelitian terakhir yang peneliti jadikan referensi ialah penelitian dari "*Johan Albert Piche*, tahun 2001. Judul dari penelitian tersebut adalah "*Resolusi Konflik antara Suku Pedalaman*". Jurnal Sripsi : Universitas Cendrawasih." Rumusan masalah dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah resolusi konflik yang terjadi pada konflik antar suku pedalaman di Papua. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana resolusi konflik yang terjadi dalam konflik antar suku di Papua. Hasil dari penelitian ini ialah menganalisis tata cara perdamaian dan resolusi konflik yang terjadi pada suku pedalaman Papua Barat. Resolusi konflik terjadi dengan adanya bantuan tokoh–tokoh adat kedua belah suku untuk mengadakan perdamaian yang disusul dengan upacara bakar batu.

Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penelitian–penelitian tersebut membahas tentang politisasi politik dan resolusi konflik. Yang ditulis dan diteliti oleh penulis saat ini adalah mengkaji sudut pandang masyarakat tentang politisasi konflik yang terjadi dalam konflik Desa Balinuraga Kecamatan Way panji Kabupaten Lampung Selatan. Persoalan yang menjadi objek penelitian penulis adalah meneliti apakah terjadi politisasi dalam konflik antar warga Desa Balinuraga dengan Desa Agom dan akhirnya meluas menjadi konflik berskala Nasional yang terjadi di Lampung Selatan, dan apakah terdapat aktor–aktor politik yang memanfaatkan konflik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Apakah tujuan aktor politik dalam konflik yang terjadi di Desa Balinuraga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut “Apakah terdapat aktor politik yang memanfaatkan konflik yang terjadi, dan bagaimana politisasi dalam konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan?”

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui “adakah aktor politik yang memanfaatkan konflik yang terjadi, dan bagaimana politisasi dalam konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan.”

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Pemerintahan dan tercapainya pengembangan kajian mengenai konflik.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan referensi bagi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan daerah lainnya dalam penyelesaian konflik yang terjadi.